

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia telah ditetapkan melalui Masterplan Pendidikan Riau 2020, di mana sektor pendidikan telah dirumuskan 6 persoalan dasar pendidikan (Pemda Riau, 2004), yaitu: 1) Terdapatnya penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun yang belum tertampung di bangku sekolah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 2) Rendahnya mutu pendidikan, kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan lemahnya manajemen pengelolaan sekolah; 3) Belum relevannya pengembangan program studi pendidikan tinggi dengan potensi, investasi, dan pasar; 4) Masih adanya anak usia sekolah buta huruf, putus sekolah, dan *drop out*; 5) Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan sampai kecamatan/desa serta terbatasnya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan 6) Terbatasnya pengalaman, pemahaman nilai budaya daerah.

Sehubungan dengan persoalan di atas, dirumuskan 13 sasaran utama pembangunan pendidikan di Riau. Sasaran tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut, yaitu: 1) Meningkatkan pemerataan pendidikan di semua jenjang; 2) Meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan sekolah dan luar sekolah; 3) Mengembangkan sekolah berwawasan keunggulan di semua jenjang pendidikan; 4) Meningkatkan kualitas di semua jenjang pendidikan dan

kesejahteraan tenaga pendidikan; 5) Meningkatkan manajemen pendidikan; 6) Mengembangkan kebudayaan Melayu di sekolah; 7) Mengembangkan pendidikan tinggi yang berwawasan sains dan teknologi; 8) Meningkatkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 9) Pengembangan semua jenis perpustakaan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Propinsi Riau; 10) Melakukan dan meningkatkan kerjasama di semua jenjang pendidikan di dalam dan di luar negeri; 11) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam dunia usaha di bidang pendidikan; 12) Melestarikan peninggalan sejarah dan budaya; dan 13) Meningkatkan pengamalan beragama di semua jenjang pendidikan (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2001).

Masyarakat senantiasa berkembang dari masa ke masa, hal ini memaksa setiap bangsa untuk bekerja keras mengejar ketinggalannya dalam segala bidang seiring dengan semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumberdaya manusia yang berkualitas, dalam pengertian mempunyai sifat inovatif-kreatif serta menguasai iptek dan informasi secara memadai adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan baru yang lebih berat sehubungan dengan hadirnya era globalisasi dan informasi.

Pada era globalisasi dan informasi menuntut perubahan yang cepat dan mendasar di berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut mengarah pada pengembangan nilai-nilai demokrasi, otonomi dan transformasi yang berlaku di semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang dijadikan sebagai sarana yang efektif adalah pendidikan sekolah. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

telah mengatur sistem pendidikan nasional dan implementasinya yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus terus dikaji ulang dalam sistem kehidupan di masyarakat. Memasuki era millenium ketiga, justru kita sedang berada dalam kondisi terpuruk, akibatnya kurang mapannya sistem pendidikan selama ini. Berbagai kelemahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem yang dimiliki harus senantiasa memperbaiki sistem yang dimiliki dengan memacu pada tujuan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*). Sistem pendidikan harus mengalami penyesuaian mengikuti "trend" ke arah pembentukan masyarakat yang lebih mandiri, merdeka dan sedikit ketergantungan terhadap birokrasi. Peranan birokrasi yang selama ini begitu dominan diwarnai sistem pendidikan nasional tentu secara perlahan-lahan harus diubah, salah satunya dengan menghilangkan sistem sentralisasi pendidikan secara bertahap. Dengan demikian maka diperlukan paradigma baru pendidikan.

Sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi muatan, pengelolaan, maupun arah kebijakan. Untuk itu diperlukan reformasi yang cukup mendasar terhadap pendidikan yang lebih baik. Pemerintah harus melakukan reformasi di bidang pendidikan. Tanpa pembaharuan sistem secara mendasar, tidak mungkin perubahan akan terjadi. Kini tidak lagi waktunya membebaskan pendidikan hanya pada sekolah. Sudah saatnya institusi masyarakat menjadi institusi pendidikan, sehingga institusi pendidikan tidak berarti hanya sekolah saja tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Ada 10 paradigma baru pendidikan yang ditawarkan oleh Ace Suryadi (2002), yaitu: 1) pendidikan adalah proses pembebasan; 2) pendidikan adalah sebagai proses pencerdasan; 3) pendidikan menjunjung tinggi hak anak; 4) pendidikan menghasilkan tindak perdamaian; 5) pendidikan adalah proses pemberdayaan potensi manusia; 6) pendidikan menjadikan anak berwawasan integrif; 7) pendidikan menjadi wahana membangun watak persatuan; 8) pendidikan menghasilkan manusia demokratis; 9) sekolah menghasilkan manusia yang peduli lingkungan; dan 10) sekolah instrument pendidikan.

Dari pendapat di atas maka paradigma baru untuk bidang pendidikan adalah pendidikan yang mengacu pada tuntutan globalisasi yang bercirikan kebebasan dalam pengembangan potensi, bersifat demokratis dalam pengelolaan pelaksanaannya, memperhatikan keseimbangan dan terintegrasi dengan pendidikan rohaniah sehingga perlu penanganan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Provinsi Riau di masa persaingan global memerlukan sumberdaya manusia (SDM) paripurna. Manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan. Pada setiap rencana pembangunan jangka panjang dan menengah selalu tercantum bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan kurikulum,

pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan lainnya, peningkatan manajemen pendidikan, serta pengadaan fasilitas lainnya.

Hasil mata pelajaran kelompok IPA ujian nasional berdasarkan rerata dan persentase dari tahun 2006/2007 sampai dengan tahun 2009/2010 untuk Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Rerata dan Persentase Hasil Mata Ujian Nasional Kelompok IPA**

Tahun	Kab/kota	BIND	BING	MTK	FIS	KIM	BIO	Jumlah				
								Peserta	Lulus	%	Tidak Lulus	%
2006/2007	Propinsi	7.71	7.69	7.63	-	-	-	10962	10726	97.85	236	2.15
	Nasional	7.56	7.84	7.29	-	-	-	484713	462334	95.38	22379	4.62
2007/2008	Propinsi	7.55	7.24	7.36	8.3	7.78	7.84	13061	12750	97.62	311	2.38
	Nasional	7.6	7.32	7.48	6.91	7.76	7.81	506417	478194	94.43	28223	5.57
2008/2009	Propinsi	7.14	7.76	8.85	8.13	8.74	6.51	13941	13805	99.02	136	0.98
	Nasional	6.82	7.81	7.76	7.97	8.34	7.2	544692	526819	96.72	17873	3.28
2009/2010	Propinsi	7.67	8.64	8.87	7.45	8.33	8.53	16907	16902	99.97	5	0.03
	Nasional	7.46	7.69	8.12	7.9	8.08	7.42	628667	626545	99.66	2122	0.34

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peserta ujian nasional kelompok IPA SMA Provinsi Riau pada mata ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2009/2010 hampir dapat dikatakan selalu melebihi rerata tingkat nasional, perbedaan hanya terjadi pada tahun 2008/2009 dan 2009/2010 dimana mata ujian Fisika dan Biologi masih dibawah rerata nasional dengan persentase kelulusan 99,76% dan ketidak lulusan 0,25 %.

Hasil ujian nasional untuk kelompok IPS dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2009/2010 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2.**  
**Rerata dan Persentase Hasil Mata Ujian Nasional Kelompok IPS**

Tahun	Kab/kota	BIND	BING	MTK	EKO	SOS	GEO	Jumlah				
								Peserta	Lulus	%	Tidak Lulus	%
2006/2007	Propinsi	7.14	6.94	6.51	-	-	-	18666	17301	92.69	1365	7.31
	Nasional	6.95	7.13	6.58	-	-	-	631038	574708	91.07	56330	8.93
2007/2008	Propinsi	6.82	6.58	6.91	7.68	7.27	6.38	19722	17993	91.23	1729	8.77
	Nasional	6.95	6.74	7.1	7.67	7.6	6.46	642794	576897	89.75	65897	10.3
2008/2009	Propinsi	6.48	7.28	8.25	7.91	6.67	7.96	20715	20036	96.72	679	3.28
	Nasional	6.31	7.25	7.7	7.36	6.81	6.88	668588	615724	92.09	52864	7.91
2009/2010	Propinsi	7.2	8.17	8.5	7.48	6.75	6.79	27451	27403	99.83	48	0.17
	Nasional	7.02	7.22	8.03	7.01	6.69	6.92	844765	834527	98.79	10238	1.21

Sedangkan informasi yang dapat dijelaskan dari Tabel 1.2 yaitu Provinsi Riau untuk mata ujian Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi dan Geografi dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2009/2010 telah dapat melebihi rerata tingkat nasional dengan persentase tingkat kelulusan sebesar 96,73% dan ketidak lulusan sebesar 3,26%.

Memperhatikan fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai hasil Ujian Nasional baik matakuliah IPA maupun IPS di Provinsi Riau masih di atas perolehan Nasional. Namun dari sisi perilaku keseharian siswa, juga banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat. Dari dunia usaha muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan kerja yang baik. Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, yaitu kalangan SMP merasa bekal lulusan SD kurang baik untuk memasuki SMP dan kalangan SMA merasa lulusan SMP tidak siap mengikuti pembelajaran di sekolah menengah atas. Begitu pula,

kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan SMA belum cukup untuk mengikuti perkuliahan. Fakta tersebut menunjukkan, upaya peningkatan pendidikan yang selama ini dilakukan belum mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di Provinsi Riau.

Rendahnya mutu pendidikan tersebut perlu dicari solusinya secara bersama-sama. Semua pihak perlu turut bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan, dan terobosan apa yang harus dijalankan, sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peran LPTK sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan, karena LPTK merupakan lembaga penghasil tenaga guru. Selain LPTK, masih banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan bermutu, di antaranya dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, K3S, dan lainnya. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah ini. Untuk itu, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pemetaan Dan Pengembangan Mutu Pendidikan Di Provinsi Riau.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah agregasi penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil peta kompetensi peserta didik SMA di Provinsi Riau tiap pokok bahasan mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) ?
- 2) Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga peserta didik di Provinsi Riau tidak menguasai pokok bahasan tertentu ?

- 3) Bagaimana rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik SMA di Provinsi Riau ?
- 4) Bagaimana model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan agregasi penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Mengungkap peta kompetensi peserta didik SMA di Provinsi Riau tiap pokok bahasan mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional ).
2. Mengungkap faktor penyebab peserta didik di Provinsi Riau tidak menguasai pokok bahasan tertentu.
3. Menemukan rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik SMA di Provinsi Riau.
4. Merumuskan model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait.

### **1.4. Luaran /Manfaat Penelitian**

Penelitian PPMP Provinsi Riau diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut.

- 1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik setiap mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) di Provinsi Riau.

- 2) Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar pada mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) di Provinsi Riau terutama menyangkut: sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.
- 3) Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret di Provinsi Riau melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

